



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PENANGANAN HIV DAN AIDS DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Implementation Of Banyuwangi Regency Government Policies In Handling
HIV And AIDS In Banyuwangi Regency*

Novia Qurrota Ayun¹, Hary Priyanto², Erna Agustina³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹Email: novianyunnnn@gmail.com

²Email: harysangabi@gmail.com

³Email: erna.agustina@untag-banyuwangi.ac.id

Abstract

Rapid development in Banyuwangi Regency has presented a serious challenge in the form of increasing HIV and AIDS cases. This phenomenon is ironic for a region currently transforming into a leading tourist destination, and also illustrates the gap between the success of physical development and the community's social preparedness to face its negative impacts. The increasing number of people living with HIV (PLWHA) is not only a health issue but also an indicator of systemic failure in social protection and the effectiveness of public policies. This research is based on a qualitative descriptive approach. The purpose of the study is to describe and analyze the role of the Banyuwangi Regency Health Office, as the leading sector of the Banyuwangi Regency Government, in implementing Regional Regulation Number 5 of 2017 on HIV and AIDS management in Banyuwangi Regency. The study concludes that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2017 by the Banyuwangi Regency Health Office in addressing HIV and AIDS has been structured through a collaborative and integrative approach. However, significant challenges remain, such as the high number of PLWHA cases in Banyuwangi Regency, social stigma against PLWHA, limited access to health services, and suboptimal education and community participation.

Keywords: HIV and AIDS; Effectiveness of Management; Policy Challenges

Abstrak

Pembangunan yang pesat di Kabupaten Banyuwangi memunculkan tantangan serius dalam bentuk meningkatnya kasus HIV dan AIDS. Fenomena ini menjadi ironi bagi daerah yang tengah bertransformasi menjadi destinasi wisata unggulan, sekaligus menggambarkan adanya kesenjangan antara keberhasilan pembangunan fisik dan kesiapan sosial masyarakat menghadapi dampak negatifnya. Peningkatan jumlah ODHA tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi menjadi indikator kegagalan sistemik dalam perlindungan sosial dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian berprinsip pada pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi serta menganalisis peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagai *leading sector* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dalam penanganan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Kesimpulan penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi HIV dan AIDS telah terstruktur melalui pendekatan kolaboratif dan integratif. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti tingginya angka kasus ODHA di Kabupaten Banyuwangi, stigma sosial terhadap



ODHA, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta belum optimalnya edukasi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: HIV dan AIDS; Efektivitas Penanganan; Tantangan Kebijakan

PENDAHULUAN

Banyuwangi merupakan salah satu daerah administratif kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi kaya potensi alam, karena terbatas oleh pegunungan dan lautan. Di era modernisasi ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengupayakan keberhasilan dalam pembangunan, dan berhasil mengubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan sektor perekonomian, kesadaran akan potensi budaya dan kearifan lokal, serta pengembangan fasilitas publik yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merancang dan melaksanakan beragam kebijakan dalam pembangunan karena beragam kebijakan tersebut tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, melainkan juga menghadirkan tantangan sosial baru yang pada akhirnya berdampak terhadap nilai-nilai sosial dan moralitas masyarakat.

Fenomena sosial yang muncul seiring perkembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatnya penyebaran *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Peningkatan kasus HIV dan AIDS ini menjadi isu serius yang tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. HIV merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai jenis penyakit. Virus HIV yang menjangkiti tubuh penderita akan menghasilkan AIDS, yaitu serangkaian gejala penyakit akibat infeksi virus yang mengganggu sistem imun (Jaenab et al., 2021).

Penularan HIV menurut Kementerian Kesehatan (2019) terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu seperti darah, cairan vagina, cairan semen, cairan anal, dan ASI dari individu yang terinfeksi. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa pengaman, pertukaran jarum suntik, atau dari ibu ke bayi selama kehamilan, saat persalinan, atau melalui menyusui. Sementara itu, orang yang dinyatakan telah mengidap penyakit HIV dan AIDS disebut ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS), adalah mereka yang sudah terjangkit dan mengalami gejala mereka sering dikucilkan karena dianggap membahayakan, padahal HIV tidak akan menular sekedar melalui kontak sosial. Orang yang terdeteksi sebagai ODHA akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap infeksi atau penyakit yang tidak menyerang orang yang sehat (Efendi, et al., 2025).

Tabel 1 Jumlah Penderita HIV/AIDS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penderita Hiv/Aids (Orang)
1.	Surabaya	915
2.	Jember	741
3.	Lumajang	487
4.	Banyuwangi	486
5.	Malang	439

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (2024)

Terdapat 486 kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Tentu realitas tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan upaya tepat dan cepat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan masyarakatnya dalam konstitusi negara (Priyanto, 2024). Dengan demikian, upaya preventif yang harus dilaksanakan melalui kampanye bahaya HIV dan AIDS serta implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Permasalahan dari keberadaan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi saat ini mencakup 2 dampak utama, yaitu citra positif Kabupaten Banyuwangi saat ini sebagai kota yang ramai didatangi oleh wisatawan menjadi buruk; dan peran pemerintah dalam penanganan HIV dan AIDS yang efektif menekan laju pertumbuhan kasus HIV dan AIDS, sehingga berpotensi semakin meningkat. Terdapat *multiplier effect* sebagai penggambaran dampak eksistensi keberadaan sektor pariwisata, dimana *multiplier effect* ini digambarkan sebagai sebuah konsekuensi yang harus diterima disebabkan oleh peningkatan sektor lain. Selain hal tersebut, Priyanto (2018) yang mengemukakan, suatu situasi sosial seperti penyimpangan dapat menimbulkan perpecahan kelompok dari tingkah laku patologis yang menyimpang dari norma umum. Kedua pendapat tersebut sejalan dengan kondisi dari kasus HIV dan AIDS sebagai akibat dari maraknya kehidupan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Pada satu sisi kebijakan pembangunan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial, namun pada sisi lain juga menimbulkan tantangan besar di ranah kesehatan masyarakat.

Pemerintah punya peran penting menangani berbagai persoalan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan fase patologi dalam masyarakat harus dihentikan dengan baik melalui kerjasama dari pemerintah dan juga masyarakat (Majidah, et al., 2025). Penyebab permasalahan yang dialami masyarakat karena aspek ketidakberdayaan seseorang pada usia kerja, sulit mendapat pekerjaan, karena aspek individu, serta pengaruh lingkungan (Safinah, et al., 2024). Fungsi kuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani HIV dan AIDS adalah program kerja berbasis kebijakan publik yang telah ditetapkan. Penting diungkapkan karena kebijakan publik berfungsi sebagai alat pengawasan serta ketertiban sosial, karena sebuah kebijakan dibentuk agar tercipta keteraturan dalam masyarakat (Priyanto, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti berharap, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur penting dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya terkait kebijakan publik dalam menangani berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Manfaat penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan pertimbangan dan/atau masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait penanganan HIV dan AIDS secara berkelanjutan, dan sebagai pemikiran baru demi meningkatnya Kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat secara berkualitas.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai gambaran dan referensi untuk memperkaya bahan kajian serta sebagai evaluasi dari hasil penelitian

sejenis. Sebagaimana dikemukakan Fritantus & Rukminingsih (2015), menjelaskan bahwa HIV dan AIDS merupakan permasalahan yang masih menjadi perhatian serius pemerintah. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait HIV dan AIDS menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam penelitian yang dilakukan Agustina & Pahlevi (2019) menjelaskan, masalah prostitusi baik hubungan sejenis maupun tidak, dapat memicu pada masalah kesehatan terutama timbulnya penyakit HIV/AIDS. Selain itu, pola pikir dan sikap masyarakat yang memberikan perlakuan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV dan AIDS. Adapun pada penelitian lainnya, Guswantoro (2014) menjelaskan, 4 kriteria penanganan HIV dan AIDS, yaitu: (1) efektivitas, efisiensi serta ketepatan dari pelaksanaan Perda; (2) kecukupan data; (3) responsivitas semua pihak secara efektif; dan (4) ketepatan dalam distribusi manfaat.

Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai komponen masyarakat menganggap keberadaan HIV dan AIDS dapat menimbulkan ketidak-keteraturan sosial. Keberadaan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan payung hukum dalam melakukan pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi secara adil dan berkemanusiaan. Kebijakan publik dimaknai sebagai tindakan pemerintah secara tertulis untuk menjalankan tugas pemerintahannya dalam pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat sasaran (Nazah, 2020; Marzali, 2016). Kebijakan publik tidak sekedar menyangkut aparatur negara, tetapi juga pengelolaan sumber daya publik, sehingga harus bertumpu pada masalah publik. Adapun prosedur pembuatannya dari penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Sutikno, et al., (2025) mengungkapkan kebijakan publik membahas soal bagaimana isu dan perosalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan politik.

Munculnya masalah publik karena ada kebutuhan yang tidak tertangani. Oleh karenanya kebijakan publik ditempatkan sebagai tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Priyanto, 2023). Jika pemerintah telah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan tujuan tersebut tidak semata-mata keinginan pemerintah semata (Zakiyah & Priyanto, 2024). Berhasil tidaknya kebijakan ditentukan pada proses implementasinya. Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan harus di implementasi oleh implementornya. Menurut Priyanto & Hentika (2024) pengawasan dan evaluasi suatu kebijakan merupakan hal penting. Karena kekurangan dan kesalahan dari suatu kebijakan publik bisa diketahui setelah ada implementasi.

Masalah serius di Kabupaten Banyuwangi adalah fenomena HIV dan AIDS. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagai *leading sector* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 punya kewenangan menangani masalah HIV dan AIDS melalui program pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan ODHA melalui model kolaborasi dengan berbagai pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan

pendekatan tersebut sesuai karakteristik fleksibilitas yang tinggi pada metode kualitatif, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan dinamis, dan memahami makna yang terkandung dari yang di dapat secara individu atau kelompok secara ilmiah. Dalam pandangan Moleong (dalam Shiddiqi, et al., 2024), pendekatan kualitatif sesuai prinsip fenomenologis yang mendukung apresiasi dengan mencoba menilai dan menafsirkan signifikansi suatu peristiwa interaksi perilaku manusia pada situasi tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagai *leading sector* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dalam menangani masalah HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan bisa mengungkap situasi dan masalah program pemerintah (Anjarwati, et al., 2023), sehingga memungkinkan peneliti menggunakan intuisi dan pemahaman pribadi dalam proses analisis data, sehingga peneliti berkesempatan mengembangkan wawasan yang lebih mendalam dan dapat mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan. Peneliti menganggap jika pendekatan kualitatif deskriptif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, namun juga sebagai sarana untuk membangun pengetahuan yang lebih holistik dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti (Ekawati, et al., 2024). Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan bermakna, serta memberikan kontribusi yang signifikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan HIV dan AIDS

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 menjadi salah satu alat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai cara untuk menarik atensi dari masyarakat untuk ikut serta dalam keberhasilan program penanganan HIV dan AIDS yang ideal sehingga perubahan di masyarakat dapat terwujud maksimal. Hal tersebut karena masyarakat memandang penderita HIV dan AIDS sebagai seorang yang perlu untuk dihindari. Stigma buruk yang melekat pada asal muasal seseorang terjangkit sebagai penderita HIV dan AIDS ini menjadikan penderita lebih memilih untuk menutup diri, dan melakukan *self diagnosed* yang pada akhirnya berujung pada keterlambatan penanganan bahkan penularan kepada terdampak lain. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, serta berbagai komunitas masyarakat, seperti Kelompok Kerja Bina Sehat (KBBS) Kabupaten Banyuwangi terus berupaya keras menangani permasalahan HIV dan AIDS dengan beragam program.

Penelitian lapangan menjelaskan, “kampanye HIV dan AIDS yang dilakukan KBBS adalah bentuk keprihatinan, karena saat ini kemajuan di Kabupaten Banyuwangi telah luar biasa, masyarakat mulai menerapkan *life style* budaya modern yang bebas dan narkoba, sehingga muncul peningkatan kasus HIV dan AIDS. Kalau pemerintah dan masyarakat tidak bekerjasama untuk mencegah,



maka potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi akan tercemar.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan HIV dan AIDS tentu membantu kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Kinerja komunitas masyarakat dalam penanganan HIV dan AIDS yang tersusun sistematis, tentu menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Output* yang akan dicapai dari program kerja adalah mampu terlaksana dengan baik, dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pandangan Priyanto & Noviana (2018), suatu program kerja sangat ditentukan oleh isi, konteks, dan variabel lingkungan. Setiap program kebijakan harus mencakup beberapa aspek diantaranya mencakup kepentingan yang dapat dipengaruhi, manfaat yang dicapai, pelaksana dari program tersebut, serta sumberdaya yang akan dikerahkan sehingga mencapai target penurunan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Implementasi program pemerintah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah, dan swasta untuk mencapainya tujuan yang ditetapkan (Hidayat, et al., 2023). Parsons (dalam Septriana, et al., 2024) menyatakan proses formulasi program kebijakan, harus bisa mendefinisikan masalah dengan benar dan jelas agar memastikan jika programnya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sebab fungsi implementor suatu program harus bisa mengeliminir permasalahan atau pelanggaran yang ditemui (Ripley dan Franklin dalam Salsabila, et al., 2024).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan pembinaan atau pendampingan. Osborne dan Plastrik (dalam Madhania, et al., 2023) yang menyatakan pemerintah sebagai lembaga yang besar dan kompleks. Agar implementasi program HIV dan AIDS berhasil sesuai harapan maka harus disertai dengan pola kerja yang sejalan pada tujuan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan kebijakan penanganan HIV dan AIDS adalah dengan melibatkan keterlibatan *stakeholder* yang mampu memberikan pendampingan langsung terhadap ODHA. Meski demikian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memegang wewenang yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Kewenangan tersebut mencakup perputaran laju perekonomian, kepastian kesehatan, kepastian akan hak sosial dan politik, serta aspek lain yang menjadi hajat dari masyarakat luas. Implementasi dari kebijakan bukan hanya mengenai penjabaran suatu keputusan politik dalam prosedur birokrasi, melainkan lebih dari itu, karena menyangkut konflik, keputusan serta siapa saja yang memperoleh hasil dari kebijakan tersebut (Smith, 1973).

Penelitian lapangan menjelaskan, “Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki berbagai program dalam mencegah dan menekan tingginya angka HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya mengatur keberadaan dan kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses penanggulangan HIV/AIDS atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi serta Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyuwangi.” (Hasil wawancara, April 2025).

Pendapat tersebut merupakan penjelas salah satu cara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani kasus HIV dan AIDS, serta meminimalisir stigma

masyarakat disesuaikan dengan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya kebijakan terkait penanggulangan HIV/AIDS tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan berbagai program memiliki pedoman kuat yang harus diimplementasikan sesuai dengan kebijakan. Noviana & Priyanto (2023) mengemukakan, implementasi program pemerintah adalah transformasi dari rencana ke praktik dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Priyanto, et al. (2021), partisipasi masyarakat diperlukan dalam implementasi program pemerintah dalam pembangunan di segala bidang. Partisipasi semua pihak bisa berdampak kesejahteraan bagi masyarakat (Pasolong, 2019). Oleh karenanya diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan sebagai pihak perancang, penyelenggara, dan pembayar (Agustin, et al., 2025).

Sebagaimana hasil penelitian lapangan, “Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi bekerja atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana Pasal 2 pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2017, bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui integrasi program-program penanggulangan HIV/AIDS dengan pembangunan, pelaksanaan secara sistematis, terpadu dan komprehensif mulai dari upaya promotif, preventif, perawatan, dukungan, dan pengobatan, serta mendukung peningkatan akses dan pelayanan yang bermutu.” (Hasil wawancara, April 2025).

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi memiliki kewenangan mengintegrasikan program penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan pihak-pihak yang elaboratif serta memiliki kemampuan dalam penanggulangan kasus HIV dan AIDS. Aktivitas yang tidak relevan dengan program kebijakan berpotensi menyebabkan implementasi program tidak memberdayakan tapi justru menciptakan kemarjinalan masyarakat (Firdaus, et al., 2023). Bentuk kolaboratif tidak hanya disampaikan secara teoritis dalam bentuk pemberdayaan. Melainkan bentuk dukungan terhadap peningkatan setiap akses dan pelayanan yang bermutu. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan karena adanya stigma, kurangnya pemahaman tentang penyakit, serta faktor ekonomi dan geografis (Saifuddin, 2009).

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 memiliki urgensi untuk dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi sebuah aturan, tetapi juga merupakan panduan yang kokoh dalam upaya menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat yang semakin melebar. Tingginya masalah HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi membuktikan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret yang diatur dan dijalankan dengan ketegasan dan konsistensi. Sebab pada dasarnya setiap orang punya potensi dan kemampuan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara baik selain mengkapitalisasi kesengsarannya (Utami, et al., 2023).

Penelitian lapangan menjelaskan, “Masyarakat umum cenderung belum bisa menerima keberadaan ODHA. Caranya bermacam-macam, mulai menjauhi hingga memperolok.” (Hasil wawancara, Juni 2025).

HIV dan AIDS perlu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dengan dampak yang luas. Kusmayadi & Hertati (2022) mengasumsikan bahwa kebijakan yang baik dapat memberikan perlindungan hukum bagi ODHA agar tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karenanya

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu melakukan pemantauan dan pendampingan. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2017 dengan gamblang menekankan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan mengatur alokasi anggaran, pengadaan sumber daya manusia, dan pengelolaan program-program terkait HIV/AIDS, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk merespons masalah ini. Sebagaimana pendapat Fatmariyanti & Fauzi (2023), proses pelaksanaan akan dilalui beberapa tahapan yang dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran hingga pada penilaian kinerja.

Prosedur Penanganan HIV dan AIDS Di Kabupaten Banyuwangi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi harus mampu menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mendeskripsi dan menganalisis fenomena HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi yang disesuaikan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi pembangunan secara berkelanjutan, yang disesuaikan pemikiran Dunn (2003), sebagai berikut:

a. Penyusunan Masalah

Penelitian lapangan menjelaskan: “Angka kasus penderita penyakit HIV/AIDS di Banyuwangi, menempati peringkat kedua se Jawa Timur. Berdasarkan data pada tahun 2021, lebih dari 500 kasus yang ditemukan. Fenomena ini termasuk dalam kategori angka parsial tinggi, kedua setelah Surabaya.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Peneliti berpendapat, dalam penanganan HIV dan AIDS, perlu didasari atas kebenaran perumusan program kebijakan serta implementasinya. Dunn (2003:26); Tjokroamidjojo (dalam Islamy, 2000:24) berpendapat, perumusan dalam hal ini memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dengan mempersoalkan asumsi-asumsi mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Dengan memahami akar masalahnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat merumuskan peluang-peluang dalam menangani masalah tersebut.

Penelitian Lapangan menjelaskan: “Kabupaten Banyuwangi menghadapi peningkatan kasus HIV dan AIDS yang signifikan, yang mengancam kesehatan masyarakat, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi program penanganan HIV dan AIDS membutuhkan langkah yang konkret dan tentunya akan berbenturan dengan permasalahan, menyangkut kepentingan politik, permasalahan sumberdaya, bahkan atensi dan penurunan tingkat partisipasi dari masyarakat. Ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam permasalahan kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi implementasi serta keberhasilan kebijakan tersebut. Prosedur ini berkaitan dengan pendeskripsian, prediksi, serta deskripsi dalam aspek kebijakan publik oleh pemerintah selaku aktor. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 hakekatnya memberikan kepastian perlindungan kesehatan khususnya bagi penderita HIV/AIDS.

Berdasarkan penelitian lapangan: “Data epidemiologi menunjukkan peningkatan prevalensi HIV/AIDS, terutama di kalangan kelompok rentan seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan kelompok remaja.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Peneliti berpendapat, perlu kolaborasi lintas sektor, yaitu unsur: pemerintah, komunitas masyarakat, Kelompok bisnis, media massa, dan akademisi dan pakar. Sebagaimana pendapat Ripley dan Franklin (dalam Sukma, et al., 2023), terdapat 3 aspek untuk mencapai keberhasilan implementasi: tingkat kepatuhan setiap tingkatan birokrasi, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki. Mendasari hal tersebut, keterlibatan aktor-aktor berperan penting dalam berkontribusi pada pengembangan, evaluasi, dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 yang adaptif dan keberlanjutan. Patut diungkapkan, pemahaman yang baik tentang aktor-aktor yang terlibat dan dinamika interaksi mereka sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS dengan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan melibatkan semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017).

b. Peramalan

Peramalan merupakan proses yang juga dibutuhkan oleh pemerintah pada saat membuat kebijakan agar dapat memprediksi timbulnya dampak serta kendala yang hadir saat kebijakan tersebut diterapkan.

Penelitian lapangan mengungkapkan, “Kabupaten Banyuwangi saat ini tengah membangun citra positif melalui berbagai program pembangunan dan reformasi kebijakan publik, namun di sisi lain Kabupaten Banyuwangi juga terdata sebagai posisi keempat kabupaten di Jawa Timur dengan kasus HIV dan AIDS yang tinggi.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam meramal kondisi yang ada, sekaligus prediksi dalam penanganannya, baik melalui edukasi pencegahan, penanganan, serta sarana fasilitas kesehatan yang dapat menunjang pemeriksaan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Dunn (2003: 291-292), peramalan atau prediksi adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ramalan memiliki tiga bentuk utama yakni proyeksi, prediksi, perkiraan.

Peramalan membantu pembuat kebijakan untuk memprediksi dampak dari berbagai alternatif kebijakan mengenai HIV dan AIDS. Pertimbangan nilai serta dampak yang akan ditimbulkan akibat implementasi kebijakan merupakan salah satu wewenang dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu meramalkan alternative serta nilai-nilai yang ideal untuk masyarakat termasuk keterbukaan layanan kesehatan serta peningkatan pemahaman terkait penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS di Banyuwangi. Perlu dipahami, implementasi program harus disertai komunikasi efektif sehingga membentuk kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Rendahnya

komunikasi dan kolaborasi dapat mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan, karena kepatuhan kelompok sasaran dipengaruhi isi atau program kebijakan (Dinasty, et al., 2025).

Penelitian lapangan mengungkapkan, “hal utama yang menyebabkan penyebaran HIV dan AIDS yang cepat adalah kurangnya kesadaran serta akses terhadap layanan penegahan dan pengobatan. Ini mencakup kurangnya pendidikan tentang HIV dan AIDS, stigma sosial, serta keterbatasan dalam akses ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan terkait HIV dan AIDS.” (Hasil wawancara, Juni 2025).

Mendasari fenomena HIV dan AIDS di Banyuwangi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memiliki data relevan dan metode peramalan yang tepat, pemerintah membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif mengingat kasus HIV dan AIDS di Banyuwangi terus meningkat. Dengan metode yang tepat dan data yang akurat, peramalan dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan mendukung perencanaan jangka panjang yang lebih baik. Proses implementasi ini membutuhkan langkah yang konkret dan tentunya akan berbenturan dengan permasalahan, menyangkut kepentingan politik, permasalahan sumberdaya, bahkan atensi dan penurunan tingkat partisipasi dari masyarakat (Firdaus, et al., 2025).

c. Rekomendasi

Untuk mengetahui manfaat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dari akibat HIV dan AIDS yang menjadi masalah di Kabupaten Banyuwangi, maka perlu ada tahapan rekomendasi.

Penelitian lapangan mengungkapkan, “rekomendas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani fenomena HIV/AIDS harus mencakup evaluasi komprehensif dari berbagai alternatif kebijakan, seperti program edukasi di sekolah, kampanye kesadaran publik, distribusi kondom gratis, peningkatan layanan kesehatan terpadu, dan kerjasama dengan LSM lokal.” (Hasil wawancara, April 2025).

Peneliti berpendapat bahwa setiap alternatif rekomendasi harus dinilai berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak sosial-ekonomi. Karena rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko, dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Dunn (2003:27) menjelaskan rekomendasi dapat membuah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.

Rekomendasi program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengarah pada kombinasi dari berbagai alternatif yang telah dievaluasi, seperti mengintegrasikan pendidikan HIV dan AIDS ke dalam kurikulum sekolah, mengadakan kampanye kesadaran, menyediakan kondom gratis, dan meningkatkan layanan kesehatan. Implementasi kebijakan harus disertai dengan rencana aksi yang terperinci, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi dampak untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi penyebaran HIV dan AIDS di Banyuwangi. Menurut peneliti, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat harus dinilai berdasarkan efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak

sosial-ekonomi, diimplementasikan dengan rencana aksi yang jelas, monitoring berkelanjutan, dan evaluasi dampak untuk memastikan keberhasilan dalam mengurangi penyebaran HIV dan AIDS.

d. Pemantauan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memiliki indikator dalam mengukur atau memantau pencapaian target dan dampak dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Membentuk keberhasilan program pemantauan kebijakan harus disertai kualitas pemahaman dan kepatuhan aparatur saat implementasi, serta di tunjang partisipasi, monitoring, dan evaluasi (Ramadan, et al., 2024).

Penelitian lapangan mengungkapkan, “Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi telah berupaya melakukan komunikasi secara efektif dengan berbagai pihak yang berkepentingan menangani masalah HIV dan AIDS, termasuk melakukan pelatihan staf, dan memperkuat kepemimpinan tiap bagian kelembagaan agar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 diterapkan dengan baik.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Peneliti berpendapat, proses pemantauan ini penting dilaksanakan untuk mengidentifikasi hasil serta perbaikan dari kebijakan yang telah terlaksana. Kinerja pemantauan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi berfungsi menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan. Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan (Dunn, 2003:28)

Penelitian lapangan mengungkapkan, “implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 telah mencakup mekanisme akuntabilitas untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.” (Hasil wawancara, Mei 2025).

Pandangan peneliti, pemantauan dan implementasi program penanganan HIV dan AIDS di Banyuwangi harus mencakup pengawasan sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi program yang diterapkan, termasuk terhadap inisiatif program edukasi, kampanye kesadaran, distribusi kondom, dan peningkatan layanan kesehatan. Sebagaimana diungkapkan Lester & Salamon (2002:9), pendekatan berbasis kinerja dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan diukur berdasarkan pencapaian hasil yang spesifik menggunakan indikator kinerja yang jelas dan relevan. Maknanya pemantauan harus melibatkan pengumpulan data secara teratur untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan dan mendeteksi masalah dalam implementasi.

Implementasi kebijakan harus didukung oleh koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memerlukan sumber daya yang memadai dan penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari pemantauan. Peneliti berpendapat bahwa begitu penting pemantauan sebagai acuan evaluasi agar program kebijakan terus konsisten terlaksana dengan baik dan ideal. Kelembagaan pemerintah harus mampu

mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*bottom-up*), demokratis dan tidak bersikap dominan demi mencapai keberhasilan (Pitaloka, et al., 2024).

e. Evaluasi

Evaluasi terhadap implementasi program penanganan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 harus dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Dunn (2003); Bardach (2012); Patton (2008) menjelaskan, evaluasi kebijakan publik adalah proses kritis yang terdiri dari beberapa tahap kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian lapangan mengungkapkan, “evaluasi kinerja dalam penanganan HIV dan AIDS yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi program penanganan HIV dan AIDS yang sedang berjalan untuk di evaluasi agar diketahui tantangan-tantangannya dan upaya perbaikannya.” (Hasil wawancara, Juni 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, evaluasi tidak hanya sebagai bentuk pengambilan kesimpulan dari penerapan program kegiatan yang bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 saja, melainkan juga untuk mengukur apakah permasalahan tersebut dapat terselesaikan atau membutuhkan perbaikan kembali. Evaluasi efektif hanya berlaku pada kebijakan yang di implementasi (Azizah, et al., 2025). Dengan demikian hasil evaluasi, termasuk temuan dan rekomendasi, harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih efektif dalam mengatasi fenomena HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

Peneliti berpendapat, bahwa dalam menganalisis program penanganan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan melalui aspek: (1) efektivitas, yaitu terkait langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi; (2) efisiensi, yang mencakup program penanganan HIV dan AIDS harus terlaksana secara tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; (3) kecukupan, yaitu menyangkut kecukupan aspek sumber daya yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, baik Sumber daya Manusia (SDM) maupun anggaran yang dibutuhkan; (4) kesetaraan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 memberikan keadilan serta perlakuan yang setara dalam ranah kepastian kesehatan oleh ODHA; (5) daya tanggap, yaitu berkaitan dengan keseriusan dan daya tanggap dari aparaturnya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam menangani HIV dan AIDS; dan (6) presisi, yaitu terkait peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam menyatukan, mengintegrasikan, serta memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin terlibat dalam program penanganan HIV dan AIDS.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi HIV dan AIDS telah terstruktur melalui pendekatan kolaboratif dan integratif. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti tingginya angka kasus ODHA di Kabupaten Banyuwangi, stigma sosial terhadap ODHA, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta belum



optimalnya edukasi dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan program yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sangat bergantung pada keterlibatan multiaktor, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten.

SARAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu:

- a. Perkuat edukasi dan kampanye publik untuk menghapus stigma terhadap ODHA, terutama melalui sekolah dan media lokal.
- b. Tingkatkan akses layanan kesehatan yang ramah dan inklusif, khususnya untuk kelompok rentan.
- c. Optimalkan kolaborasi lintas sektor dengan LSM, akademisi, dan komunitas untuk mendukung program pemerintah.
- d. Lakukan evaluasi berkala dan berbasis data terhadap implementasi kebijakan agar perbaikan bisa dilakukan secara adaptif dan berkelanjutan.
- e. Pastikan pengawasan dan transparansi anggaran, serta penguatan kapasitas SDM Dinas Kesehatan untuk efektivitas implementasi di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eka Nanda., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2025). Metal Children Of Port Ketapang: The Reality Of Poverty In The Implementation Of Sustainable Development. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 4(2), 347–358. Doi: 10.54443/ijset.v4i2.671.
- Agustina, E., & Hentika, N. P. (2019). Analisis Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Populasi Gay dan Waria di Kabupaten Banyuwangi. *Reformasi*, 9(2), 96-103.
- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023) Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568.
- Azizah, Fahreza Nur., Sri Wilujeng, & Hary Priyanto. (2025). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Kolaboratif Triple Helix: Suatu Identifikasi Dan Mengatasi Patologi Pelayanan Kependudukan Di Desa Sukomaju. *Nusantara Hasana Journal*, 4(8), 92–103. Doi: 10.59003/nhj.v4i8.1310.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2023). *A Practical Guide For Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving*. CQ press.
- Dinasty, Puja Aulia., Hary Priyanto, & Niko Pahlevi Hentika. (2025). Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix. *Nusantara Hasana Journal*, 4(10), 40–53. Doi: 10.59003/nhj.v4i10.1385.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. (2024). *Profil Kesehatan Tahun 2023*.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Efendi, I., Priyanto, H., & Pahlevi Hentina, N. (2025). Analisis Kontradiksi Aktivitas Prostitusi Di Eks. Lokalisasi Pakem, Banyuwangi. *Katarsis*, 2(2), 85–95. Doi: 10.62734/kts.v2i2.567.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13038–13052. Doi:10.31004/innovative.v4i1.10592.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.
- Firdaus, A. M., Priyanto, H., & Hentika, N. P. . (2025). Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Penanganan Anak Jalanan Menuju Kabupaten Banyuwangi Layak Anak. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 958–968. Doi: 10.59141/cerdika.v5i3.2554.
- Firdaus, Royatul., Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Kajian Kritis Pada Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Jalan Provinsi Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(2), 176–182. Doi: 10.36526/sosioedukasi.v12i2.3199.
- Fritantus, Y., & Rukminingsih, N. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kota Surabaya (Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01).
- Guswantoro, D. (2014). Evaluasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surabaya (Kajian Terhadap KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan data kasus HIV/AIDS tahun 2010 s/d 2014 di Kota Surabaya). *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 12(01).
- Hidayat, N. A. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496-1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030.
- Jaenab, J., Prabawati, S., Novitasari, R., & Wulandari, S. R. (2021). Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 10 Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 337-342.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 122-129.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
- Majidah, Wardah Rifkah., Safrieta Jatu Permatasari, & Hary Priyanto. (2025). Pembinaan Pengamen Eksentrik Pada Kawasan Publik Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Perubahan Dari Kemiskinan Menuju



- Kesejahteraan. Nusantara Hasana Journal, 4(12), 261–275. Doi: 10.59003/nhj.v4i12.1450.
- Marzali, A. (2016). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Prenada Media.
- Nazah, F. M. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 Kota Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Dalam Pembangunan Transmart Di Kota Tasikmalaya)* (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).
- Patton, M. Q. 2008. *Utilization-Focused Evaluation*. 4th Edition. Sage Publications.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Banyuwangi.
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03
- Priyanto, Hary. (2025). *Analisis Kebijakan Publik: Dasar dan Implementasi*. Lamongan: Academia Publication.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 yang mengatur regulasi tentang pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi
- Pitaloka, N. R. A., Imaniar, D., & Priyanto, H. (2024). Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(02), 2745-4584, Doi: 10.37680/almikraj.v4i02.4890.
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *Qalamuna Journal*, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto H, & Hentika NP. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. 24(1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Ramadan, Iqbal., Hary Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2024). Bulurejo-Banyuwangi Village Fund Postulate As Supporting The Effectiveness Of



- Empowering Pre-Prosperous Communities. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1). Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3973.
- Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 458-465. Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3527.
- Salsabila, A. ., Priyanto, H. ., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1(3), 14-25. Doi: 10.62734/kts.v1i3.280.
- Saifuddin, Abdul Basri. (2009). *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Septiana RV, Priyanto H, Vitasari L. (2024). Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Utopis or Prosperity?. *JOELS: Journal of Election and Leadership*. 5(2): 161-171. Doi:10.31849/joels.v5i2.22406.
- Smith, TB. (1973). Proses Implementasi Kebijakan. *Ilmu Kebijakan*, 4,197-209.
- Sutikno, S., Priyanto, H., & Pahlevi Hentika, N. (2025). Pelayanan Publik Dalam Tranformasi SAKIP Pada Pemerintah Kecamatan Bangorejo. *Katarsis*, 3(1), 28–37. Doi: 10.62734/kts.v3i1.572.
- Shiddiqi, Izzul Haque Ash., Leni Vitasari, & Hary Priyanto. (2024). Strategi Komunikasi Calon Legislatif Muda Pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 64–77. Doi: 10.59003/Nhj.V4i3.1199
- Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
- Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2023). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Katarsis*, 1(1).
- Zakiah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: 10.37849/mici.v6i1.406.